

---

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) PADA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIBUGEL KABUPATEN SUMEDANG****Oleh****Salamatul Afiyah<sup>1)</sup>, Annida Aljannatul Arsy<sup>2)</sup>, Engkus<sup>3)</sup>****<sup>1,2,,3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia****E-mail: <sup>1</sup>[salamatul.afiyah@uinsgd.ac.id](mailto:salamatul.afiyah@uinsgd.ac.id), <sup>2</sup>[nidaaarsy@gmail.com](mailto:nidaaarsy@gmail.com)****<sup>3</sup>[engkus@uinsgd.ac.id](mailto:engkus@uinsgd.ac.id)****Abstract**

This research is motivated by the principles of transparent and accountable financial management so that it is a description of the transactions that occur from the use of economic resources in one period. The problem of this research is that the presentation of the financial statements of the Cibugel Community Health Center (Puskesmas) in Sumedang Regency in 2018 - 2020 is less than optimal. In 2018 the percentage was only 78%. The purpose of this study was to determine how the implementation, obstacles, and efforts in the presentation of financial statements based on PSAP. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. The data sources used are primary and secondary data sources related to the analysis of the application of PSAP Number 13 in the Cibugel Health Center Financial Report. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation studies. The results of the research have shown that the application of PSAP Number 13 to the Financial Statements of the Cibugel Health Center, Sumedang Regency has been implemented, but not fully because there are still several components of the financial statements that are not in accordance with the rules contained in PSAP Number 13.

**Keywords: Analysis, Implementation of Government Accounting Standards, Puskesmas****PENDAHULUAN**

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk memudahkan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) diterapkan untuk ada kesamaan di semua laporan keuangan, baik pemerintahan pusat maupun daerah.

Badan Layanan Umum (BLU) juga bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan mengenai aktivitas yang menggunakan sumber daya ekonomi setiap periodenya. Dalam penyusunan laporan keuangannya, dijelaskan dalam PP Nomor 74 Tahun 2012 bahwa laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dapat menjalankan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dapat pula

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga Badan Layanan Umum (BLU) dipersamakan dengan entitas pelaporan, di mana laporan keuangan paling tidak paling tidak mencakup laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan atas laporan keuangan. Jumlah dan bentuk laporan keuangan sama dengan entitas pelaporan keuangan induknya. Tetapi dijelaskan kembali dalam Peraturan menteri keuangan Nomor 217 Tahun 2015 bahwa BLU dalam menyajikan laporan keuangannya menggunakan satu standar saja yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Badan Layanan Umum yang ada di daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD menggunakan peraturan-peraturan yang digunakan oleh BLU. Hal ini terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018. Sehingga sama

dengan BLU, BLUD dalam menyusun laporan keuangannya juga menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tepatnya pasal 105 ayat 2 dijelaskan bahwa BLUD wajib menyesuaikan dan menerapkan peraturan ini paling lambat dua tahun setelah peraturan ditetapkan. Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum untuk melakukan penyederhanaan dalam pelaporan keuangan BLU.

Penerapan PSAP ini tidak boleh dipisahkan dengan PSAP yang telah diterbitkan sebelumnya karena dalam pasal 5 ayat (2) PMK No. 217 tahun 2015 menyebutkan bahwa PSAP No. 13 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran I PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI. PSAP ini mulai digunakan dalam penyusunan laporan keuangan BLU untuk tahun anggaran 2016 dan disusun dengan pendekatan terhadap PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Puskesmas Cibugel Kabupaten Sumedang merupakan salah satu yang statusnya sudah menjadi BLUD. Sebagai BLUD, Puskesmas Cibugel juga menyajikan laporan keuangannya berdasarkan SAP sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dijelaskan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang secara efektif diberlakukan mulai dari tahun 2016, yang kemudian akan dilakukan pengauditan oleh BPK RI.

Menurut Easton dalam (Engkus, 2019) sistem politik merupakan sistem alokasi nilai-nilai baik materi maupun non-materi, dimana terjadi pengalokasian nilai-nilai yang bersifat

paksaan dan kewenangannya bersifat menyeluruh.

Dalam hal ini, seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 yang menghimbau BLUD untuk menerapkan SAP dalam penyajian laporan keuangannya paling lambat dua tahun setelah peraturan ditetapkan, dan kemudian ditegaskan untuk BLUD yang berdomisili di Kabupaten Sumedang dihimbau untuk menerapkan PSAP Nomor 13 dalam penyajian laporan keuangannya sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang mulai diberlakukan dari tahun 2016 (Bupati, Sumedang, 2018).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 13 bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antara periode, maupun antar BLU. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Untuk menganalisis sejauh mana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 pada penyajian laporan keuangan Puskesmas Cibugel, dapat ditinjau dari teori analisis sistem menurut Easton dalam (Engkus, 2019) ada lima instrumen penting yang dapat dijadikan tolak ukur yaitu: input, process, output, feedback, dan environment.

Dalam proses Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Layanan Umum, dapat diukur berdasarkan persentase kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh entitas pelaporan dengan PSAP Nomor 13 baik mengenai ketentuan ataupun format penyusunannya.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 13 yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa Laporan Keuangan BLU adalah bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuan dari adanya Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan.

Dalam penyajian laporan keuangan BLUD Puskesmas Cibugel kesesuaian antaran laporan yang disajikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 adalah sebesar 78% karena dalam Laporan Realisasi Anggaran terdapat pos SiLPA/SiKPA, tidak disajikannya Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dalam Laporan Operasional tidak terdapat Pos Luar Biasa, dan dalam Laporan Arus Kas tidak terdapat pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.

## LANDASAN TEORI

### Penelitian Sejenis Yang Relevan

1. Fitri Rahmadani, 2018. Judul: “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 Tentang Laporan Keuangan Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Subulussalam”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam telah memenuhi persyaratan penyajian laporan keuangan menurut PSAP No. 01 dan melihat apakah isi laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam memenuhi persyaratan minimum isi laporan keuangan sebagaimana dalam PSAP No. 01. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Subulussalam

telah melakukan proses Penyusunan Laporan Keuangan akuntansinya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01, untuk proses pencatatannya telah sesuai juga, walaupun ada sedikit kekurangan dalam mencantumkan unsur-unsur pada Laporan Realisasi Anggaran, namun Laporan Keuangan telah diajukan tepat waktu sehingga bisa digunakan oleh kelompok pengguna Laporan Keuangan guna mengambil keputusan.

2. Muhammad Saleh Ash-shiddiq, 2016). Judul: “Analisis Penerapan PSAK No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No.01 tentang Penyajian Laporan Keuangan di Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta (Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan). Metode penelitian yang digunakan adalah dokumentasi dan metode analisis data yang digunakan adalah teknik Miles & Huberman. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta telah menerapkan PSAK No. 01 dalam penyajian Laporan Keuangan yang berupa Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan meskipun ada beberapa perbedaan dalam penyajian laporan keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta dengan PSAK No. 01 yaitu tidak adanya Laporan Perubahan Ekuitas karena semua ekuitas yang ada pada Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta merupakan milik Pemda setempat.
3. (Elvi Maryana, 2017). Judul: “Analisis Kesiapan Implementasi PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit BLUD Provinsi Sumatera Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, kesiapan

sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sistem informasi terhadap kesiapan implementasi PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada seluruh Rumah Sakit BLUD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi, kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sistem informasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan implementasi PSAP No. 13.

### **Kajian Teoretis**

#### **Administrasi Publik**

Sondang P. Siagian mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan rasionalisme tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

#### **Administrasi Keuangan**

Menurut (Syarifudin, 2015), “Administrasi Keuangan adalah usaha atau kegiatan pimpinan dalam memproses keuangan, menggunakan fungsi-fungsi manajemen, menggerakkan para pejabat atau petugas keuangan, serta pengelolaan keuangan ini bersifat formal karena diatur menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”.

#### **Laporan Keuangan**

Menurut (Kasmir, 2019) Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

#### **Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pasal 1 ayat 1 menjelaskan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

### **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

(Martani, 2012) dalam bukunya Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK menyebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan bagi pemerintah pusat maupun daerah.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

(Moleong, 2017) menjelaskan tentang penelitian kualitatif bahwa:

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara mendeskripsikannya dengan kata-kata ataupun bahasa secara alamiah”

Penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2012) merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara secara rinci agar dapat menemukan pola-pola yang dapat dipahami. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena mengenai masalah ataupun keadaan tertentu yang dijadikan objek penelitian yang mana nanti ditemukan penjelasan-penjelasan dari makna akan temuan dan pemahaman tertentu.

Penelitian ini mengevaluasi Laporan Keuangan dari Puskesmas Cibugel selaku Badan Layanan Umum Daerah dengan melakukan analisis secara komparatif yang konsepnya dengan membandingkan objek penelitian dengan kebijakan akuntansi maupun penyajian laporan keuangan. Kemudian melakukan penyesuaian beberapa unsur atau komponen yang harus disajikan menyangkut

pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Observasi partisipasi aktif dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi dan data-data tentang Laporan Keuangan Puskesmas Cibugel.

Wawancara dengan teknik purposive sampling dilakukan untuk mencari informasi yang dibutuhkan dengan narasumber yang dapat mewakili suatu populasi untuk mendapatkan informasi yang sesuai.

Dokumentasi dilakukan dengan mencari dokumen yang terkait dengan penyajian laporan keuangan Puskesmas Cibugel Tahun 2018.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model dari Miles Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis sistem dalam sebuah penerapan menurut David Easton dalam (Engkus,E,2019). terdapat 5 instrumen yaitu input, process output, feedback, dan environment.

Input. Di dalam proses ini pembentukan kebijakan sebagai interaksi yang terjadi antara lingkungan dan pembuat kebijakan dalam proses yang dinamis. Input yang diterima adalah dalam bentuk permintaan dan tuntutan. Menurut Permendagri Nomor 79 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Kerja dan Anggaran dan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Process. Tahap ini merupakan transisi dari awal dalam bentuk input dalam bentuk tuntutan dan dukungan menjadi keputusan kebijakan.

Untuk penyajian pos-pos keuangannya sudah sesuai dengan PSAP No. 13 diantaranya

terdapat kas dan setara kas, investasi jangka panjang, piutang dari kegiatan BLU, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas. Dengan itu, Puskesmas Cibugel telah menyajikan Neraca sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 13 sebesar 100%.

Laporan Operasional yang disajikan oleh Puskesmas Cibugel sudah 83% sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 13, karena terdapat akun pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, surplus/defisit dan tidak menyajikan pos luar biasa.

Laporan Arus Kas yang disajikan oleh Puskesmas Cibugel Kabupaten Sumedang sudah 100% sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 13 karena menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas dan mengklasifikasinya arus masuk dan keluar berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris.

Puskesmas Cibugel telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran 100% sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 13 karena terdapat akun Pendapatan-LRA, Belanja, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto, dan SiLPA.

Laporan Perubahan Ekuitas yang disajikan oleh Puskesmas Cibugel sudah 100% sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 13 karena menyajikan 3 akun yaitu: Ekuitas awal, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih telah 100% sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAP No. 13 karena menyajikan 6 pos keuangan yaitu: saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, Lain-lain, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Output. merupakan hasil dari suatu proses yang mengubah tuntutan menjadi hasil

kebijakan/keluaran kebijakan, suatu sistem harus membuat konflik atau resolusi konflik karena sistem dibangun atas elemen-elemen yang mendukung sistem dan ini tergantung pada interaksi antara berbagai subsistem. Output merupakan hasil dari suatu proses yang mengubah tuntutan menjadi hasil

Feedback dilihat bagaimana kebijakan itu ditetapkan menjadi dasar kebijakan lain, atau dapat dikatakan bahwa keluaran sistem ini menjadi input bagi sistem yang lain. dengan pemerintah menetapkan PSAP No. 13 sebagai standar umum bagi instansi BLUD untuk menyusun laporan keuangannya, dan instansi terkait menerapkannya, maka dengan diterapkannya peraturan tersebut, entitas pelaporan dapat menyusun laporannya secara sistematis. Sesuai dengan studi dokumentasi yang dilakukan, dengan membandingkan kesesuaian antara penyajian laporan keuangan Puskesmas Cibugel Tahun 2018 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 belum sepenuhnya sesuai maka kebijakan yang diambil oleh instansi agar penyajian laporan keuangan pada periode selanjutnya diperbaiki.

Environment. Di sini, kebijakan terdapat dua bagian yang diketahui, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Di mana kedua lingkungan ini mempengaruhi kebijakan publik yang diterapkan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada Puskesmas Cibugel Kabupaten Sumedang, laporan keuangan yang disusun pada Tahun Anggaran 2018 sampai Tahun 2020 sudah berjalan dan isinya telah menyajikan informasi posisi keuangan yang cukup sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13, tetapi belum maksimal sepenuhnya karena pada Tahun 2018 ada beberapa komponen laporan keuangan yang tidak disajikan.

Puskesmas Cibugel adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban

menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan pada tiap tahun anggarannya. Dan sejak tahun anggaran 2018, entitas pelaporan di Kabupaten Sumedang menyusun laporannya dalam dua metode yaitu secara manual atau tertulis dan menggunakan aplikasi khusus yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Peneliti merekomendasikan peningkatan kompetensi sumber daya, baik SDM maupun sumber daya non SDM (sarana dan prasarana).

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Halim dan Syam Kusufi. (2012). Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi. Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- [2] Anggara, S. (2015). Metode Penelitian Administrasi. CV Pustaka Setia.
- [3] Ash-shiddiq, M. S. (2016). Analisis Penerapan PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- [4] Bastian, Indra. (2005). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. PT Gelora Aksara Pratama
- [5] Engkus, E. (2019). Green Building Policy Formulation in the Municipality of Bandung Indonesia. *Sosiohumaniora*, 21(3), 296–304. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23612>
- [6] Faud, Ramli. (2014). Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia
- [7] Herdiansyah, H. (2015). Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif. In *Metodologi Penelitian*.
- [8] Kasmir. (2019). analisi laporan keuangan jakarta Rajawali Persada. *Journal of Business & Banking*. <https://doi.org/10.14414/jbb.v6i2.1299>

- [9] Kawenas, R. I., Kalangi, L., & Lambey, L. (2018). Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL."* <https://doi.org/10.35800/jjs.v9i1.18685>
- [10] Maryana, E. (2017). Analisis Kesiapan Implementasi PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan keuangan Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit BLUD Provinsi Sumatera Selatan. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- [11] Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In PT. Remaja Rosda Karya.
- [12] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- [13] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
- [14] Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Teknis
- [15] Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
- [16] Rahmadani, F. (2018). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 tentang Laporan Keuangan Pemerintahan pada Pemerintah Kota Subulussalam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- [17] Rosmery, Elsy. (2016). Dasar-dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia
- [18] Silalahi, U. (2014). Pengertian metode dan metodologi penelitian. Feb, 26. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijntmar.2016.12.002>
- [19] R&D. In Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/10.1007/s11116-011-9347-8>
- [20] PT Alfabet. In Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- [21] Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In ke-26.
- [22] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- [23] Engkus, E. (2013). Desentralisasi (Teori yang Baik dengan Praktek yang buruk). *DESENTRALISASI (Teori yang Baik Dengan Praktek yang buruk)*, (4), 1-16.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN